

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BIREUEN

Muhammad Saifrizarl^{1*)}

¹ Staf Pengajar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKI

*) email: m_saifrizarl@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Target Clarity Budget and Accounting System Implementation of the Regional Financial Institution Performance Accountability Bireuen District Government. Data obtained by questionnaires distributed in 15 offices SKPD Bireuen district with a total sample of 45 samples. The analysis technique used is linear regression, hypothesis testing using t-statistic, test F and test the coefficient of determination as well as the f-statistic to test the effect partially to the level of significance of 5%. The result showed that the Target Budget Clarity has a significant positive effect on Accountability is equal to 0.534. Application of Regional Financial Accounting System positive and significant impact on Accountability, with a regression coefficient of 0.737. Concurrent test results showed that the Clarity Budget Goals and Implementation Regional Financial Accounting System influence on employee performance, with a coefficient of determination of 83.7%.

Keywords: Budget Targets Clarity, SIKD Implementation, Accountability

1. Pendahuluan

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus

dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* (LAN dan BPKP, 2000 : 1).

Akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah

harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, juga tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pemerintah dalam usaha lingkup anggaran pun menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda).

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Keberadaan sasaran anggaran yang jelas serta kemudahan yang didapatkan individu untuk menyusun target-target anggaran, akan menjadikan anggaran yang telah direncanakan menjadi tepat sasaran. Sehingga setiap tahunnya tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebabkan oleh tidak tercapainya program yang direncanakan Pemerintah.

Selain kejelasan sasaran anggaran faktor penerapan sistem informasi keuangan daerah juga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini sesuai dengan manfaat penerapan sistem akuntansi itu sendiri bahwa manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian ini bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “apakah kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen?”. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Landasan Teoritis

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas daripada akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan sektor publik yang memberikan manfaat informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Informasi yang diperoleh melalui suatu laporan keuangan pemerintah dapat berupa informasi-informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil kegiatan atau kinerja pemerintah. Menilai dan membandingkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan pemerintah antara realisasi dengan yang direncanakan/dianggarkan dapat membantu penentuan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan serta dapat membantu mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah dengan prinsip *value for money* (efektivitas dan efisiensi).

Untuk memenuhi tuntutan publik terutama dalam hal akuntansi pemerintah daerah masih perlu adanya perbaikan. Berbeda dengan akuntansi yang biasa diterapkan oleh sektor privat, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari (1) Laporan Realisasi APBD, (2) Neraca Pemerintah Daerah dan (3) Laporan Arus Kas. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) mengharuskan pemerintah melakukan

perbaikan-perbaikan, salah satunya yaitu perbaikan dalam hal akuntansi pemerintah. Aspek yang perlu direformasi dalam akuntansi sektor publik adalah terkait dengan standar akuntansi keuangan pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan pada sistem akuntansi pemerintah (Halim, 2007:64).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik oleh masyarakat kepada pemerintah mengharuskan pemerintah untuk membuat laporan kepada pemerintah pusat dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu alat bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja suatu organisasi (Munawir, 2007:48). Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah ke dalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003:23). Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, pemerintah menyelenggarakan akuntansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi (Halim, 2007:46). LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas, dengan lemahnya akuntabilitas mengidentifikasi lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematis.

Menurut Baridwan (2007:76) Karakteristik laporan keuangan memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni.

1) Relevan

LKPD dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang dan menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan adalah informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud dari pengguna informasi tersebut. Informasi yang relevan harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap.

2) Andal

Informasi akuntansi yang relevan tetapi dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan yang sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Diasumsikan pengguna laporan memiliki pemahaman atau pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Deddi (2007:59) dalam akuntansi sektor publik mendefinisikan anggaran sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*).

Secara lebih spesifik, Halim (2002:40) menyebutkan bahwa anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Mardiasmo (2009:76) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: "SAKD adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi".(Pasal 70:ayat 1)

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan: "Sistem akuntansi pemerin-

tahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer". (Pasal 23:ayat 1)

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:3) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mardiasmo (2009:43) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima

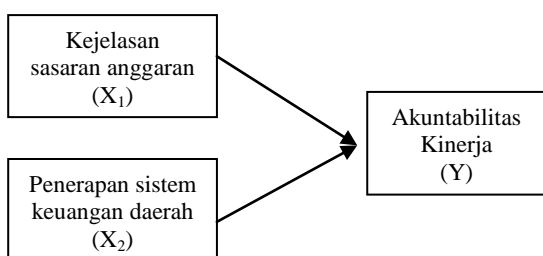
penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Inpres No 7 Tahun 1999 yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kerangka Pemikiran

Akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sangat penting agar laporan keuangan menjadi lebih berguna dan akan semakin meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik merupakan alat yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga nantinya akuntabilitas dan transparansi publik akan terwujud sebagai salah satu upaya untuk mencapai *good governance*.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Hipotesis Penelitian

H₁ = Variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

H₂ = Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

H₃ = Variabel kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini,

metode deskriptif kuantitatif tersebut digunakan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Bireuen, uji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survey dengan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden mengenai kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Bieruen. Masing-masing variabel disiapkan kuesioner dengan jumlah pertanyaan yang berbeda satu dengan yang lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan, dan Staf Adminitrasi keuangan yang meliputi sebagian SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 15 SKPD. Adapun sampel pada penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang terdiri dari masing-masing Sekretaris Dinas, Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan, dan Staf Administrasi Keuangan yang berjumlah 45 sampel atau responden.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu suatu metode pemilihan sampel yang digunakan untuk meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah atau sasaran penelitian. Sampel atau responden dalam penelitian ini adalah 45 orang sampel atau responden penelitian.

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

- Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- α = Konstanta
- X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran
- X₂ = Penerapan Sistem Keuangan Daerah
- β₁ β₂= Koefisien Regresi
- e = error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data Responden

Data hasil penelitian ini diperoleh dari 15 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian. Responden pada penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang terdiri dari masing-masing Sekretaris Dinas, Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan, dan Staf Administrasi Keuangan yang berjumlah 45 sampel atau responden.

Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 73,3,9% dan yang perempuan adalah 26,7%. Usia responden yang paling dominan adalah antara 41 - 50 tahun dengan persentase 51,1 %. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Sarjana dengan jumlah 17 orang atau sebesar 37,8%. Seterusnya dilanjutkan dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 16 orang atau sebesar 35,6%.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Suatu instrument dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi antara butir dengan skor total dalam instrumen tersebut lebih besar dari r-tabel dengan tingkat kesalahan Alpha 0,05. Kemudian suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien Cronbach Alpha minimal 0,65.

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	r-hitung (Pearson Correlation)	Df (Df=N-2=43), r-tabel	Ket
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	X _{1.1}	0.758	0.294	Valid
	X _{1.2}	0.657	0.294	Valid
	X _{1.3}	0.785	0.294	Valid
	X _{1.4}	0.631	0.294	Valid
	X _{1.5}	0.709	0.294	Valid
	X _{1.6}	0.821	0.294	Valid
Penerapan Sistem Keuangan Daerah (X ₂)	X _{2.1}	0.715	0.294	Valid
	X _{2.2}	0.700	0.294	Valid
	X _{2.3}	0.754	0.294	Valid
	X _{2.4}	0.679	0.294	Valid
	X _{2.5}	0.720	0.294	Valid
	X _{2.6}	0.688	0.294	Valid
	X _{2.7}	0.671	0.294	Valid
	X _{2.8}	0.815	0.294	Valid
	X _{2.9}	0.763	0.294	Valid
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	Y-1	0.703	0.294	Valid
	Y-2	0.855	0.294	Valid
	Y-3	0.869	0.294	Valid
	Y-4	0.813	0.294	Valid
	Y-5	0.634	0.294	Valid
	Y-6	0.760	0.294	Valid
	Y-7	0.735	0.294	Valid
	Y-8	0.868	0.294	Valid
	Y-9	0.702	0.294	Valid
	Y-10	0.886	0.294	Valid

Dapat dijelaskan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kejelasan

sasaran anggaran, penerapan sistem keuangan daerah adalah valid karena memiliki nilai koefisien korelasi (r-hitung) > 0,294 dan nilai signifikansi < 0,05.

Selanjutnya Uji Reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini menggunakan nilai Cronbach Alpha, yaitu untuk mengetahui unidimensionalitas butir-butir pertanyaan terhadap variabel yang diteliti. Nilai Cronbach Alpha dinyatakan reliabel jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,65.

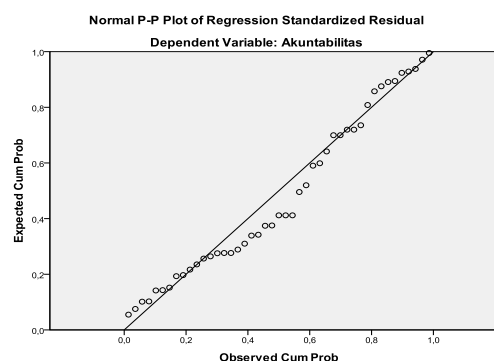
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Skala Alpha	Keterangan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	0,810	0,65	Reliabel
2	Penerapan Sistem Keuangan Daerah (X ₂)	0,878	0,65	Reliabel
3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0,731	0,65	Reliabel

Instrumen penelitian untuk seluruh variabel penelitian adalah reliabel, karena nilai Alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,65.

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak.



Titik-titik pada normal probability plot menyimpang dan mengikuti garis diagonal, maka disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas suatu keadaan dimana di antara variabel bebas dalam model regresi terdapat korelasi yang signifikan.

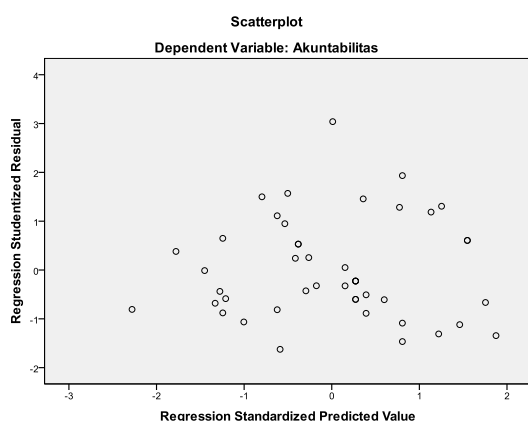
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	0,765	3,080
Penerapan SIKD (X ₂)	0,765	3,080

Nilai *tolerance* dari 2 variabel bebas semuanya lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidak-samaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dapat dilakukan dengan metode *scatter plot*.



Titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig uji t
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	0,534	1,318	0,001
Penerapan SIKD (X ₂)	0,737	2,886	0,000
Konstansta	= 1,261		
R square	= 0,844		
Adjusted R Square	= 0,837		
F hitung	= 113,683		
F tabel	= 1,694		
Signifikansi F	= 0,000		

Berdasarkan hasil olah SPSS maka, model regresi linier berganda yang dihasilkan adalah :

$$Y = 1,261 + 0,534 (X_1) + 0,737 (X_2)$$

Hasil Uji Simultan / Uji-F

Hasil uji kelayakan model dengan *F-test* menunjukkan bahwa nilai F-hitung 113,683 dengan

tingkat signifikansi 0,000 yang berada di atas nilai F-tabel sebesar F tabel = 1,69 dengan taraf nyata (α) = 0,05 (5%), ini berarti bahwa model yang digunakan pada penelitian ini *fit* (layak).

Uji Statistik-t

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara sendiri-sendiri dari masing-masing variabel bebas (independen) pada variabel terikat yang juga dikenal dengan pengujian secara parsial.

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai t hitung untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X₁) pada 1,813 dan angka signifikansi sebesar 0.001 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan pada 0.05, maka terbukti bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitassesuai dengan hipotesis pertama.
2. Nilai t hitung untuk variabel penerapan sistem keuangan daerah (X₂) pada 2,886 dan angka signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan pada 0.05 maka terbukti bahwa penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas sesuai dengan hipotesa kedua.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Bireuen diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh dan hubungan sebab akibat yang searah terhadap akuntabilitas. Setiap nilai kejelasan sasaran anggaran naik maka dapat meningkatkan akuntabilitas. Nilai koefisien regresi variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diketahui sebesar 0,534 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini membuktikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Penerapan SIKD Terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, dengan koefisien regresi sebesar 0,737. Ini berarti bahwa meningkatnya penerapan sistem keuangan daerah maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan sebaliknya, menurunnya penerapan sistem keuangan daerah maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil uji serentak menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas, dengan koefisien determinasi sebesar 0,837 yang berarti bahwa 83,7% variasi pada variabel Akuntabilitas mampu diterangkan oleh kedua variabel kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah secara bersama-sama.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis persamaan koefisien regresi yang diperoleh yaitu $Y = 1,261 + 0,534 (X_1) + 0,737 (X_2)$ dapat disimpulkan bahwa variable penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh lebih besar terhadap akuntabilitas pemerintahan kabupaten bireuen apabila di bandingkan dengan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas.

Bila kita perhatikan dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Darwanis (2013) yang meneliti mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa : Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.

Kemudian jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan maka dapat dijelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pada pemerintahan kabupaten bireuen. hal ini berarti antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang telah penulis lakukan sejalan.

5. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (x_1) adalah sebesar 0,534.
2. Penerapan sistem keuangan daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja di Pemerintahan Kabupaten Bireuen dengan demikian hipotesis 2 didukung secara parsial.

3. Kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan koefisien determinasi sebesar 0,837 yang berarti bahwa 83,72% variasi pada variabel Akuntabilitas mampu diterangkan oleh kedua variabel bebas.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah Kabupaten Bireuen sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen sebaiknya lebih sering memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variable-variabel lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi., 2007. *Prosedur Penelitian*. Percetakan Kencana, Jakarta
- Bachtiar . 2009. "Manajemen Keuangan Daerah Lemah". *Harian Rakyat Aceh*, Jumat 5 Juni.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Haiqal, Muhammad. 2009. Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Aceh Jaya). *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala.
- Halim, Abdul. 2002. "Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah". Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

- Kenis, I. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review* LIV (4). 707-721.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2001. "Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 3, No.2 :441-456
- 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- 2009. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2, No.1 :1-17
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- 2001. *Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Yudianto, Ivan. 2005. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Fraud. *Tesis*. Program Pasca-sarjana, Universitas Padjajaran Bandung.